

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh Peneliti dari hasil wawancara, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam Hal Melakukan pendidikan Pemilih KPU Kota Mataram melakukan berbagai Langkah-langkah yang sudah di pertimbangkan dan di sesuaikan dengan stituasi dan kondisi yang ada di lapangan, langkah tersebut adalah Sosialisasi Terkait Pendidikan Pemilih yang di lakukan di 50 kelurahan yang berada di Kota Mataram, Penggunaan Teknologi Informasi yang dimana KPU Kota Mataram memanfaatkan Teknologi informasi seperti Radio dan Televisi untuk melaksanakan Pendidikan Pemilih, Pemanfaatan Media Sosial yang di lakukan dengan cara membuat suatu Rekaman video yang kemudian di sebarakan melalui akun resmi KPU Kota Mataram Seperti. Youtube, Facebook, Instagram dan Twiter, dan Pemanfaatan Media Cetak dengan Menggunakan Koran, Spanduk dan Baliho dalam Melaksanakan Pendidikan Pemilih. Langkah langkah tersebut di lakukan untuk Menarik Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada tahun 2020.
2. Selain Langkah langkah tersebut KPU Kota Mataram juga menemui kendala atau Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Pilkada tahun 2020. Faktor factor Tersebut adalah Jadwal Pemilu yang di tunda akibat dampak dari Pandemic Covid 19, Keterbatasan Interaksi antara KPU dan

Masyarakat hal ini juga akibat dari dampak Covid 19 yang dimana akibat dari dampak tersebut membuat Sosialisasi Terkait Pendidikan Pemilih di batasi dari segi jumlah peserta Maupun durasi waktu pelaksanaan Pendidikan Pemilih. Maka dapat di simpulkan bahwa inti dari kendala atau Faktor Penghambat KPU Kota Mataram dalam pelaksanaan Pendidikan Pemilih adalah Pandemic Covid-19



1.1 Saran

Diharapkan Kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram dapat lebih fokus untuk Melihat berbagai Kendala ataupun Faktor penghambat yang terjadi dalam proses pelaksanaan Pendidikan Pemilih, untuk di jadikan sebagai bahan evaluasi dan di pecahkan akar permasalahannya, seperti problem di undur nya jadwal Pemilu yang semula di laksanakan pada bulan september tetapi di undur dan di laksanakan pada 09 Desember 2020, akibat dari Dampak Covid 19 sehingga proses pelaksanaan Pendidikan Pemilih tidak maksimal bahkan ada kegiatan yang sudah berjalan tetapi tidak bisa untuk di teruskan, Seperti Sosialisasi di Lembaga Pendidikan, karena pada Masa Pandmeic Covid 19 seluruh Lembaga Pendidikan melaksanakan segala Aktifitas Pembelajaran secara Online. Sehingga tidak ada Siswa/Mahasiswa yang melaksanakan aktivitas Pembelajaran secara tatap muka. Hal tersebut seharusnya mampu di Manfaatkan oleh KPU dalam melaksanakan Pendidikan Pemilih dengan bekerjasama pada Lemabag pendidikan terkait, untuk Memberikan Sosialisasi pendidikan Pemilih secara Online dan KPU Kota Mataram bisa diuntungkan karena adanya bantuan Paket Internet dari pemerintah untuk Siswa/Mahasiswa untuk Melaksanakan Aktivitas pembelajaran secara Online, sehingga dalam pelaksanaanya Siswa/Mahasiswa tidak terbebani oleh Kuota Internet. Problem lain yang muncul dalam pelaksanaan pendidikan Pemilih adalah keterbatasan Interaksi antara KPU dan Masyarakat, problem tersebut terjadi akibat Dampak Pandemi Covid – 19, yang membatasi segala bentuk Interkasi antara KPU dan Masyarakat. Hal ini dapat di lihat bagaimana dalam kegiatan Sosialisasi terkait Pendidikan Pemilih secara Tatap muka hanya di perbolehkan di isi oleh 30 Peserta.

Mengacu dari Problem tersebut KPU Kota Mataram selain inovasi dalam pencegahan penyebaran Covid 19, perlu sekiranya KPU memastikan informasi yang di sampaikan terhadap 30 Peserta pada setiap kelurahan mampu di teruskan ke Masyarakat yang lain, Seperti dengan cara setiap Peserta di berikan semacam buku panduan terkait Pilkada untuk berikutnya di bagikan Ke Masyarakat agar informasi atau Materi Sosialisasi dapat di ketahui oleh Masyarakat yang tidak terlibat dalam Kegiatan Sosialisasi pendidikan pemilih. Selain hal tersebut Problem berikutnya adalah Belum aktifnya Masyarakat dalam mencari Informasi terkait Pilkada, selain kebiasaan Masyarakat yang kurang membaca informasi terkait pilkada yang terdapat pada Kantor Kecamatan dan Kelurahan, maka KPU Kota Mataram seharusnya merubah pola pusat informasi terkait pilkada sehingga Masyarakat dapat membaca dan mengetahuinya seperti pemasangan papan informasi yang mudah di akses oleh Masyarakat, mengingat selama Pandemic Covid-19 mobilitas Masyarakat sangat terbatas karena aturan yang di keluarkan pemerintah akibat dampak penyebaran Covid-19.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

